J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Efektivitas Pengelolaan Aset Kendaraan di Setda Jombang : Kajian atas Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas

Dinda Maura Prameswari[1], M. Agus Muljanto[2]
[1,2]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
E-mail: 22041010211@student.upnjatim.ac.id[1], magusmuljanto@upnjatim.ac.id[2]

Article History:
Received: 10 Desember 2024
Revised: 05 Januari 2025
Accepted: 07 Januari 2025

Keywords: *Regional Asset Management, Service Vehicles, Effectiveness, Lease Policy*

Abstract: *The management of regional assets, especially official vehicles, is an important element in ensuring good and efficient governance. This study aims to evaluate the effectiveness of the official vehicle lease policy at the Regional Secretariat of Jombang Regency, by analyzing it using the view of effectiveness theory according to Duncan in his book Organizational Effectiveness, which focuses mainly on goal achievement, integration, and adaptiveness. The method used is descriptive qualitative, which involves interviews and direct observation. The results of the discussion show that the official vehicle rental policy has succeeded in increasing budget efficiency and operational flexibility, as well as reducing administrative burdens. Good communication between the government and service providers, as well as the use of e-catalogs, support transparency and accountability in procurement. However, challenges related to the transition to electric vehicles still need to be addressed through long-term planning and more in-depth socialization. Overall, while this policy shows significant potential, there is still room for improvement to optimize the effectiveness of official vehicle asset management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu faktor terpenting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Kendaraan dinas merupakan salah satu jenis aset yang memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Kendaraan dinas digunakan untuk menunjang mobilitas para pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Putri dan Susiloadi, 2023). Oleh karena itu, efektivitas aset kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan menjadi semakin penting untuk diperhatikan, khususnya di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jombang. Pengelolaan aset kendaraan dinas harus dilakukan secara hati-hati dan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga dapat meminimalisir pemborosan anggaran dan memaksimalkan pelayanan publik (Nyemas, Martoyo dan Haryono, 2013).

Kehadiran kendaraan dinas di instansi pemerintah sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan kendaraan dalam pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintahan. Proses pengadaan kendaraan dinas ini merupakan pembelian aset tetap pemerintah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sumber dana APBN atau APBD ini sebagian berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Proses pengadaan jasa sewa kendaraan juga harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Anggaran 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun Anggaran 2024 mengenai Standar Biaya Umum

Pengadaan kendaraan dengan sistem sewa berarti pemerintah menggunakan kendaraan dinas yang disediakan oleh penyedia sewa. Pemerintah akan membayar sejumlah uang sewa untuk setiap kendaraan kepada penyedia. Penyedia sewa akan menanggung seluruh biaya pembelian untuk penggantian sprepart, pemeliharaan, pajak, dan penyusutan kendaraan. Kontrak kerja sama antara pemerintah dan penyedia sewa mengatur hak, kewajiban, dan pembagian risiko yang berlaku bagi kedua belah pihak dalam penggunaan kendaraan.

Masalah yang sering dihadapi pemerintah dalam pengadaan kendaraan dinas adalah adanya potensi penyelewengan yang bisa dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyedia barang/jasa, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara (Simbolon *et al.*, 2023). Potensi penyimpangan ini dapat diminimalisir dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan pengadaan kendaraan dinas, seperti melalui skema sewa. Berbeda dengan sistem pembelian, yang mengharuskan pemindahan kepemilikan kendaraan dari penjual ke pembeli, skema ini tidak melibatkan perubahan hak milik. Dalam sistem pembelian, risiko atas kepemilikan aset secara otomatis beralih kepada pembeli setelah kendaraan diterima. Akibatnya, pembeli harus menanggung berbagai biaya, termasuk pembelian, operasional, pemeliharaan, serta penyusutan nilai kendaraan tersebut (YADISAR, 2023).

Sebagai sebuah instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang kuat untuk meningkatkan kegiatan administrasi dan pembangunan di seluruh wilayah, Sekretariat Daerah Jombang pastinya masih memiliki tantangan dalam pengelolaan aset kendaraan dinas. Efektivitas pengelolaan aset kendaraan dinas menjadi fokus utama untuk menjaga efisiensi operasional, terutama dalam hal aspek pengadaan melalui sistem sewa. Namun demikian, efektivitas kebijakan penerapan sistem sewa kendaraan dinas di Setda Jombang masih memerlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah dengan kebijakan sistem sewa ini sudah terlaksana dengan baik di Setda Jombang.

Efektivitas kebijakan sewa kendaraan dinas di Setda Jombang perlu dievaluasi dari berbagai sisi seperti, tercapainya tujuan, komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam kebijakan, dan penyesuaian terhadap teknologi yang terbaru. Kajian terhadap sistem kebijakan sewa kendaraan dinas juga penting untuk memahami beberapa keuntungan dari kebijakan ini. Diharapkan dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam proses pemindahtanganan aset ke depannya (Wartuny, 2020).

LANDASAN TEORI

Efektivitas umumnya dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan operasional dan sasaran organisasi. Secara mendasar, efektivitas mengacu pada sejauh mana tugas atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini juga menggambarkan kualitas hasil kerja yang dilakukan, yaitu sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan ekspektasi. Dengan kata lain, suatu pekerjaan dapat dianggap efektif apabila dilaksanakan sesuai

dengan rencana, tanpa mempertimbangkan faktor waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Menurut pendapat dari A.F Stoner dalam Nawawi (2013: 190) mengartikan efektivitas sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Komaruddin dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainuddin (2014:96), efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas manjemen dalam menapai tujuannya. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan standar yang digunakan dalam mengukur dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan sebuah manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Anis, Usman dan Arfah, 2021)

Penulis menggunakan teori Menurut Duncan yang dikutip Steers (1985:53) pada jurnal (HERMAWAN, 2009) dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" untuk mengukur efektivitas kebijakan sewa kendaraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang , terdapat tiga indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
   Pencapaian tujuan mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik merupakan salah satu cara untuk menilai tingkat keberhasilan atau efektivitasnya, di mana perhatian utama difokuskan pada pencapaian hasil akhir yang diharapkan, baik dalam bentuk output yang terukur maupun dampak yang sesuai dengan tujuan awal organisasi.
2. Integrasi
   Integrasi menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, membangun konsensus, dan menciptakan komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan pihak pihak lain. Kemampuan ini penting untuk memastikan adanya keselarasan visi, misi, dan tujuan antara berbagai pihak yang terlibat. Proses sosialisasi yang baik berperan sebagai landasan dalam membangun sinergi dan memperkuat hubungan antara elemen-elemen organisasi.
3. Adaptasi
   Adaptasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal maupun kebutuhan internal. Dalam konteks ini, pengadaan dan pengisian tenaga kerja menjadi indikator utama kemampuan adaptasi organisasi. Aspek ini mencakup kecepatan, fleksibilitas, dan efektivitas organisasi dalam merespons perubahan kondisi pasar, teknologi, atau regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami perspektif terkait Efektivitas Pengelolaan Aset Kendaraan di Setda Jombang: Kajian atas Sewa Kendaraan Dinas. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain analisis terhadap peraturan yang relevan serta observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses pengadaan kendaraan dinas di Setda Jombang dengan menggunakan sistem sewa. Menurut Moleong (2013) dikutip dalam (Nofia Mutmainah, 2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Metode ini menyajikan data dalam bentuk deskriptif, menggunakan kata-kata dan bahasa yang relevan dengan konteks alami penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena secara mendalam, dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memberikan

pemahaman mendalam tentang pengelolaan aset kendaraan dinas di Setda Jombang, khususnya dalam aspek sewa kendaraan dinas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Kendaraan Dinas

Pada tahun-tahun sebelumnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menggunakan metode pembelian langsung dalam pengadaan kendaraan dinas, yang merupakan salah satu cara yang umum diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada waktu itu. Proses pengadaan tersebut melibatkan serangkaian langkah yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengajuan usulan, persetujuan anggaran, proses pengadaan, hingga serah terima kendaraan dinas kepada pihak terkait. Namun, pada pertengahan tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mulai merencanakan untuk beralih ke skema pengadaan kendaraan dinas dengan metode sewa. Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban pengeluaran besar di awal yang biasanya muncul dalam skema pembelian langsung. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatannya, pelaksanaan sistem sewa ini pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan skema pembelian, karena tetap mencakup langkah-langkah seperti perencanaan kebutuhan, persetujuan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, serta penggunaan dan pemantauan kendaraan dinas.

Dalam hal pengadaan kendaraan, pembelian langsung biasanya memerlukan alokasi anggaran yang besar di awal. Pengeluaran tersebut mencakup harga kendaraan, serta biaya tambahan seperti pajak kendaraan bermotor, asuransi, dan perawatan awal. Sebaliknya, metode pengadaan melalui sewa memberikan keuntungan berupa pengurangan beban biaya awal yang signifikan karena sistem pembayarannya dilakukan secara berkala.

Salah satu keunggulan utama dari metode sewa adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan tidak perlu mengalokasikan dana besar di awal, pemerintah dapat mengarahkan anggaran tersebut untuk kebutuhan prioritas lainnya, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan masyarakat. Selain itu, metode sewa sering kali sudah mencakup biaya perawatan, sehingga pengelolaan kendaraan menjadi lebih efisien tanpa memerlukan alokasi tambahan untuk perawatan rutin.

Namun demikian, efisiensi biaya ini perlu ditinjau lebih mendalam, terutama dari perspektif jangka panjang. Meskipun metode sewa tampak lebih hemat pada tahun pertama, akumulasi biaya sewa selama beberapa tahun ke depan berpotensi menyamai atau bahkan melampaui biaya pembelian langsung.

Efektivitas Sewa Kendaraan

Dalam menilai tingkat efektivitas kebijakan sewa kendaraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, penulis mengacu pada indikator efektivitas yang dirumuskan oleh Duncan dalam bukunya yang berjudul *Efektivitas Organisasi*. Indikator-indikator tersebut dijadikan pedoman untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini berhasil memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

a. Pencapaian Tujuan

Pelaksanaan kebijakan sewa kendaraan dinas oleh pemerintah telah berhasil mencapai berbagai tujuan strategis yang sebelumnya telah direncanakan, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Salah satu sasaran utama dari kebijakan ini adalah mengurangi tekanan pengeluaran besar di awal, yang umumnya diperlukan apabila pemerintah memilih untuk membeli kendaraan sebagai aset

tetap secara langsung. Melalui mekanisme sewa, pemerintah mampu mengurangi beban modal awal yang signifikan, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, atau pelaksanaan program-program sosial.

Selain itu, pendekatan sewa kendaraan memberikan keunggulan berupa fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan kendaraan dinas. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan jenis, jumlah, dan spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang seiring waktu. Fleksibilitas ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelayanan publik dan tantangan operasional yang dinamis. Di samping itu, biaya perawatan yang biasanya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan juga dapat diminimalkan, karena sebagian besar penyedia layanan sewa mencakup biaya pemeliharaan dalam paket kontrak. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menghindari pengeluaran tak terduga yang seringkali membebani anggaran.

Lebih lanjut, kebijakan ini mendukung efisiensi dalam pengelolaan aset negara, karena kendaraan yang disewa tidak perlu dicatat sebagai aset tetap, sehingga mengurangi beban administratif dan kebutuhan pelaporan yang kompleks. Dengan demikian, mekanisme sewa kendaraan tidak hanya memberikan penghematan finansial, tetapi juga meningkatkan efektivitas tata kelola aset, menyederhanakan proses administrasi, dan meminimalkan risiko penurunan nilai. Secara keseluruhan, kebijakan sudah mencapai tujuan awal dan menjadi salah satu solusi inovatif dalam pengelolaan aset daerah yang tidak hanya hemat biaya, tetapi juga strategis dalam mendukung kinerja pemerintah secara menyeluruh.

b. Integrasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah berhasil membangun komunikasi internal yang efektif dan terorganisir dengan penyedia layanan sewa kendaraan, yang merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan aset kendaraan dinas. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan sistem sewa kendaraan melalui mekanisme *e-katalog*, yang dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan *e-katalog*, pengadaan menjadi lebih mudah diawasi, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah daerah dan penyedia jasa. Hal ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan aset publik.

Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang juga berhasil mensosialisasikan kebijakan pengelolaan aset kendaraan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan koordinasi, distribusi dokumen kebijakan, dan diskusi aktif dengan pihak-pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memastikan setiap OPD memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengelolaan aset kendaraan yang efisien dan terintegrasi. Dengan demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat menciptakan sinergi antara unit kerja yang berbeda, mendukung tercapainya tujuan organisasi secara bersama-sama.

Upaya sosialisasi kebijakan ini juga diikuti dengan penguatan koordinasi antar pihak yang terlibat, memastikan kebijakan yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Koordinasi yang efektif menjadi dasar untuk mengatasi berbagai potensi hambatan,

seperti perbedaan penafsiran kebijakan, kendala administratif, atau kurangnya pemahaman teknis. Pendekatan kolaboratif ini memberikan kesempatan bagi setiap elemen organisasi untuk berkontribusi secara maksimal dalam mendukung implementasi sistem sewa kendaraan dinas, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam membangun komunikasi internal yang baik dengan penyedia jasa dan mensosialisasikan kebijakan kepada OPD terkait menunjukkan manajemen yang efektif dalam pengelolaan pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas. Upaya ini memastikan kelancaran program serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan, yang memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat menghadirkan pengelolaan aset yang efisien dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

c. Adaptasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah mengambil langkah strategis dalam meningkatkan pengelolaan kontrak sewa kendaraan dinas dengan membentuk tim khusus yang dikenal sebagai Unit/kelompok Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Tim ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola seluruh proses pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, dengan fokus utama memastikan setiap tahap berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. UKPBJ bekerja secara sinergis dengan berbagai pihak terkait, untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam hal pengadaan kendaraan dapat terpenuhi, sekaligus menjaga pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang juga telah memanfaatkan platform digital melalui web e-katalog dalam proses sewa kendaraan. Penggunaan e-katalog ini memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk mengakses berbagai informasi terkait penyedia jasa sewa, harga, dan spesifikasi teknis kendaraan secara lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, proses sewa kendaraan menjadi lebih terstruktur dan transparan, yang memungkinkan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terpercaya.

Adanya e-katalog tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga membantu dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan transparan. Ini menjadi langkah maju dalam memperbaiki sistem pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Penggunaan platform ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih modern, efektif, dan efisien, yang dapat mendukung kelancaran operasional pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak terkait.

Meskipun berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset kendaraan telah dilakukan, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang saat ini belum memiliki rencana jangka panjang untuk mengganti kendaraan dinas konvensional dengan kendaraan listrik. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat tren global yang semakin berfokus pada penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi. Namun, implementasi kendaraan listrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai kebijakan transisi dari kendaraan berbahan bakar ke kendaraan listrik. Tanpa adanya pemahaman yang cukup dan

dukungan yang kuat dari semua pihak terkait, penerapan kebijakan tersebut berpotensi mengalami kesulitan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Sekretariat Daerah untuk merancang rencana strategis yang komprehensif dan memastikan proses sosialisasi yang lebih mendalam, agar peralihan menuju kendaraan listrik dapat dilakukan dengan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang.

KESIMPULAN

Kebijakan sewa kendaraan dinas oleh pemerintah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan menghindari investasi besar di awal dan memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan kendaraan, kebijakan ini mampu menyesuaikan kebutuhan operasional yang terus berkembang. Selain itu, biaya pemeliharaan yang termasuk dalam kontrak sewa mengurangi risiko pengeluaran tak terduga, sementara proses pencatatan aset yang lebih sederhana meringankan beban administrasi. Langkah strategis ini telah mendukung efektivitas kinerja pemerintah, sekaligus menjadi inovasi dalam pengelolaan aset daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang juga menunjukkan kemampuan integrasi yang baik dalam mengelola pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas. Melalui komunikasi internal yang terstruktur dengan penyedia jasa, pemanfaatan e-katalog, serta sosialisasi kebijakan kepada OPD terkait, Sekretariat Daerah berhasil menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antarunit kerja. Pendekatan ini memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengadaptasi teknologi dan inovasi baru seperti transisi menuju kendaraan listrik. Upaya ini memerlukan perencanaan jangka panjang serta sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pembentukan UKPBJ dan pemanfaatan e-katalog menjadi langkah strategis menuju pengelolaan aset yang lebih modern, transparan, dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, meskipun kebijakan sewa kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah memberikan berbagai keuntungan, implementasinya masih memiliki ruang untuk perbaikan. Langkah-langkah yang lebih sistematis dan berbasis data diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga kebijakan ini dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Anis, I., Usman, J. dan Arfah, S.R. (2021) “Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa,” *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, hal. 1105–1116.

HERMAWAN, H. (2009) “6%. 1% 93%.,” *Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran*, hal. 150–167.

Nawawi, Z. (2013) *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.

Nofia Mutmainah, D.J.M.S.Y.S.H.S.I.M.I. (2010) “Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah,” *Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang*, hal. 1–20.

Nyemas, H., Martoyo dan Haryono, D. (2013) “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang),” *Pmis-Untan-Psian-2013*, hal. 1–17.

Putri, C.R.A. dan Susiloadi, P. (2023) "Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati," *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2), hal. 2023.

Simbolon, T.R. *et al.* (2023) "Desember 2023 (15)2:345-353 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (Diterima 30-10-2023," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2023(1), hal. 345–353.

Wartuny, S. (2020) "Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya," *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), hal. 22–33. Tersedia pada: https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33.

YADISAR, A.M. (2023) "Manajemen Pengelolaan Aset Daerah," *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). Tersedia pada: https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.722.

Zainudin, D.M. dan A. (2014) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Pustaka Pelajar.